

REVITALISASI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM MENGANTISIPASI KONFLIK SOSIAL

Sri Suneki¹, Haryono²

¹ Universitas PGRI Semarang

Email penulis: Sri.suneki@yahoo.com, hwmrt@yahoo.com

Abstrak

Pluralisme kehidupan masyarakat Indonesia sebagai kerangka yang didalamnya terdapat interaksi sosial yang menunjukkan rasa saling menghormati, menghargai, dan beradab. Keberagaman tersebut memiliki berbagai macam etnis, budaya, adat budaya yang bervariasi yang memiliki kebebasan menjalankan kehidupan sosial. Secara konsistensi dalam konteks berbangsa dan bernegara, pemahaman akan keberagaman harus menjadi dasar dan haluan dalam bersosialisasi, aktualisasi regulasi hak asasi manusia sebagai titik temu yang relevan untuk menyaukan keberagaman di Indonesia, yang secara realitas identitas kultur harus dikelola untuk meminimalisir terjadinya dinamika konflik. Argumen untuk mensosialisasi dan menyelesaikan resolusi konflik melalui pendidikan multikultural yang memberikan penekanan kepada masyarakat agar memiliki sikap saling menghormati, kesetaraan dan toleransi dan adaptif tanpa meninggalkan jati diri. dalam menghadapi perubahan masyarakat global.

Kata kunci: Pendidikan Multikultural, Konflik Sosial

Indonesia dikenal sebagai masyarakat pluralis. Hal ini tercermin dari keragaman bangsa Indonesia yang terdiri atas keragaman sosial, suku bangsa, budaya, agama, ras, bahasa dan adat-istiadat. Keragaman tersebut merupakan potensi dalam pembangunan bangsa sekaligus menjadi potensi kerawanan terjadinya konflik sosial yang dapat menyebabkan pertentangan berbagai kepentingan di antaranya kelompok-kelompok yang berbeda di masyarakat. Beberapa peristiwa muncul dan berkejolak karena adanya pertentangan dengan membawa isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) sehingga dengan cepat menyebar menjadi konflik sosial yang meresahkan.

Fenomena globalisasi berpengaruh kepada pergeseran atau perubahan tata nilai, sikap dan perilaku pada semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perubahan yang positif dapat memantapkan nilai-nilai kehidupan yang lebih berkualitas, adapun dampak negatifnya dapat menurunkan derajat nilai-nilai kemanusiaan, oleh karena itu diperlukan penguatan pendidikan yang berbasis kearifan.

Tuntutan dan apresiasi masyarakat terakomodasi secara positif disertai upaya-upaya pengembangan, dan implementasi Pancasila dalam semua aspek kehidupan. Adapun perubahan yang negative harus dideteksi dan diwaspadai sejak dini serta melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI. Hal inilah yang harus kita waspadai yang nantinya akan menghambat pelaksanaan nilai-nilai pancasila untuk menjadi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik lagi bagi rakyatnya karena perubahan.

Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang mengharagai perbedaan. Sehingga nantinya perbedaan tersebut tidak menjadi sumber konflik dan perpecahan. Sikap saling toleransi inilah yang akan menjadikan keberagaman yang dinamis, kekayaan budaya yang menjadi jati diri bangsa yang patut untuk dilestarikan.

Dalam pendidikan multikultural, setiap peradapan dan kebudayaan yang ada berada dalam posisi yang sejajar dan sama, tidak ada kebudayaan yang lebih tinggi atau dianggap lebih tinggi (superior) dari kebudayaan yang lain, dialog meniscayakan adanya persamaan dan kesamaan diantara pihak-pihak yang terlibat, anggapan bahwa kebudayaan tertentu lebih tinggi dari kebudayaan yang lain akan

melahirkan fasisme, nativisme dan chauvinism, dengan dialog, diharapkan terjadi sumbang pemikiran yang pada gilirannya akan memperkaya kebudayaan atau peradaban yang bersangkutan sehingga nantinya terwujud masyarakat yang makmur, adil, sejahtera yang saling menghargai perbedaan,

METODE

Pendidikan multikultural

Multikulturalisme adalah respon terhadap realitas, dimana masyarakat selalu menjadi plural (jamak) dan tidak monolitik. Keanekaragaman membawa perbedaan dan dapat berujung pada konflik. Namun bukan berarti konflik selalu disebabkan oleh perbedaan. Dari sudut pandang agama, keragaman keyakinan, budaya, dan pandangan hidup penting untuk diangkat kembali mengingat penganut agama-agama di Indonesia masih awam, sehingga sangat rawan dengan konflik dan kekerasan.

James A. Banks memberikan pengertian tentang Pendidikan Multikultural sebagai konsep, ide, atau falsafah sebagai suatu rangkaian kepercayaan (set of believe) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara. Pendidikan multikultural juga dapat diartikan sebagai sebuah gerakan reformasi yang dirancang untuk menghasilkan sebuah transformasi di sekolah, sehingga peserta didik baik dari kelompok gender maupun dari kelompok budaya dan etnik yang berbeda akan mendapat kesempatan yang sama untuk menyelesaikan sekolah.

Menurut Paul Gorski pendidikan multikultural merupakan pendekatan progresif untuk mengubah pendidikan secara holistik dengan mengkritik dan memusatkan perhatian pada kelemahan, kegagalan, dan praktek diskriminatif di dalam pendidikan. Keadilan sosial, persamaan pendidikan, dan dedikasi melandasi pemberian kemudahan pengalaman pendidikan dalam mewujudkan semua potensinya secara penuh dan mewujudkan manusia yang sadar dan aktif secara lokal, nasional, dan global.

Secara generik, pendidikan multikultural memang sebuah konsep yang dibuat dengan tujuan untuk menciptakan persamaan peluang pendidikan bagi semua siswa yang berbeda-beda ras, etnis, kelas sosial dan kelompok budaya. Salah satu tujuan penting dari konsep pendidikan multikultural adalah untuk membantu semua siswa agar memperoleh pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang diperlukan dalam menjalankan peran-peran seefektif mungkin pada masyarakat demokrasi-pluralistik serta diperlukan untuk berinteraksi, negosiasi, dan komunikasi dengan warga dari kelompok beragama agar tercipta sebuah tatanan masyarakat bermoral yang berjalan untuk kebaikan bersama.

Keragaman ini memang diakui telah memunculkan beberapa persoalan, misalnya perkelahian antarsuku, separatisme, dan hilangnya rasa kemanusiaan untuk menghormati hak-hak orang lain. Untuk memecahkan masalah tersebut, maka dibutuhkan suatu solusi, salah satunya adalah model pendidikan yang bersifat multikultural.

Pendidikan multikultural pada intinya adalah pendidikan yang memberikan penekanan terhadap proses penanaman cara hidup yang saling menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat dengan tingkat pluralitas yang tinggi. Dengan model pendidikan ini, diharapkan masyarakat Indonesia mampu menerima, menolerir, dan menghargai keragaman, humanism dan pluralisme yang ada di Indonesia.

Pendidikan multikultural diharapkan mampu menjawab tantangan zaman di masa globalisasi ini. Pendidikan merupakan salah satu tolak ukur dan standar mengenai seberapa jauh suatu negara mampu bersaing di dunia internasional. Semakin baik mutu pendidikan suatu negara, maka negara itu semakin siap dalam menghadapi persaingan global.

Problem Pendidikan Multikultural di Indonesia

Penerapan pendidikan multikultural di Indonesia masih mengalami berbagai hambatan atau problem. Problem pendidikan multikultural di Indonesia memiliki keunikan yang tidak sama dengan problem yang dihadapi oleh negara lain. Keunikan faktor-faktor geografis, demografi, sejarah dan kemajuan sosial ekonomi dapat menjadi pemicu munculnya problem pendidikan multikultural di

Indonesia. Problem pendidikan multikultural di Indonesia secara garis besar dapat dipetakan menjadi dua hal, yaitu : problem kemasyarakatan pendidikan multikultural dan problem pembelajaran pendidikan multikultural.

Problem Kemasyarakatan Pendidikan Multikultural Di Indonesia

Dalam studi sosial, ajakan agar selalu hidup berdampingan secara damai (koeksistensi damai) ini merupakan bentuk sosialisasi nilai yang terkandung dalam multikulturalisme. Kesadaran akan pentingnya kemajemukan mulai muncul seiring gagalnya upaya nasionalisme negara, yang dikritik karena dianggap menekankan kesatuan daripada keragaman. Bertolak dari kenyataan ini, kini dirasakan semakin perlunya kebijakan multikultural yang memihak keragaman. Tetapi, dalam implementasinya pendidikan multikultural berhadapan dengan beragam problem di masyarakat, yang menghambat penerapan pendidikan multikultural di dalam ranah pendidikan. Problem-problem tersebut antara lain.

a. Keragaman identitas budaya daerah

Keragaman ini menjadi modal sekaligus potensi konflik. Keragaman budaya daerah memang memperkaya khasanah budaya dan menjadi modal yang berharga untuk membangun Indonesia yang multikultural. Namun kondisi neka-budaya itu sangat berpotensi memecah belah dan menjadi lahan subur bagi konflik dan kecemburuan sosial. Masalah ini muncul jika tidak ada komunikasi antar budaya daerah. Tidak adanya komunikasi dan pemahaman pada berbagai kelompok budaya lain justru dapat menjadi konflik dan menghambat proses pendidikan multikultural.

Dalam mengantisipasi hal ini, keragaman yang ada harus diakui sebagai sesuatu yang mesti ada dan dibiarkan tumbuh sewajarnya. Selanjutnya diperlukan suatu manajemen konflik agar potensi konflik dapat terkoreksi secara dini untuk ditempuh langkah-langkah pemecahannya, termasuk di dalamnya melalui pendidikan multikultural. Dengan adanya pendidikan multikultural itu diharapkan masing-masing warga daerah tertentu bisa saling mengenal, memahami, menghayati dan bisa saling berkomunikasi.

b. Pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah

Sejak dilanda arus reformasi dan demokratisasi, Indonesia dihadapkan para beragam tantangan baru yang sangat kompleks. Salah satu di antaranya yang paling menonjol adalah persoalan budaya. Dalam arena budaya, terjadinya pergeseran kekuatan dari pusat ke daerah membawa dampak besar terhadap pengakuan budaya lokal dan keragamannya. Bila pada masa Orba, kebijakan yang terkait dengan kebudayaan masih tersentralisasi, maka kini tidak lagi. Kebudayaan, sebagai sebuah kekayaan bangsa, tidak dapat lagi diatur oleh kebijakan pusat, melainkan dikembangkan dalam konteks budaya lokal masing-masing. Ketika sesuatu bersentuhan dengan kekuasaan maka berbagai hal dapat dimanfaatkan untuk merebut kekuasaan ataupun melanggengkan kekuasaan itu, termasuk di dalamnya isu kedaerahan.

Konsep “putra daerah” untuk menduduki pos-pos penting dalam pemerintahan sekalipun memang merupakan tuntutan yang demi pemerataan kemampuan namun tidak perlu diungkapkan menjadi sebuah ideologi. Tampilnya putra daerah dalam pos-pos penting memang diperlukan agar agar putra-putra daerah itu ikut memikirkan dan berpartisipasi aktif dalam membangun daerahnya. Harapannya tentu adalah asas kesetaraan dan persamaan. Namun bila isu ini terus dihembuskan justru akan membuat orang terkotak oleh isu kedaerahan yang sempit. Oleh karena itu, pendidikan multikultural merupakan sesuatu yang urgen untuk mengurai pandangan-pandangan yang sempit mengenai isu kedaerahan sehingga timbul toleransi dan harmonisasi.

c. Kurang kokohnya nasionalisme

Keragaman budaya ini membutuhkan adanya kekuatan yang menyatukan (integrating force) seluruh pluraritas negeri ini. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kepribadian nasional dan ideologi negara berfungsi sebagai integrating force. Saat ini Pancasila kurang mendapat perhatian dan kedudukan yang semestinya sejak isu kedaerahan semakin semarak.

Nasionalisme perlu ditegakkan namun dengan cara-cara yang edukatif, persusif dan manusiawi bukan dengan pengerahan kekuatan. Sejarah telah menunjukkan peranan Pancasila yang kokoh untuk

menyatukan kedaerahan ini. Kita sangat membutuhkan semangat nasionalisme yang kokoh untuk meredam dan menghilangkan isu yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu pendidikan multikultural dapat menjadi jalan untuk memperkokoh nasionalisme dalam koridor keragaman bangsa yang majemuk ini.

d. Fanatisme sempit

Fanatisme dalam arti luas memang diperlukan. Namun yang salah adalah fanatisme sempit, yang menganggap bahwa kelompoknya yang paling benar, paling baik dan kelompok lain harus dimusuhi. Gejala fanatisme sempit yang banyak menimbulkan korban ini banyak terjadi di masyarakat. Gejala bonek (bondo nekat) di kalangan supporter sepak bola nampak menggejala di tanah air. Kecintaan pada klub sepak bola daerah memang baik, tetapi kecintaan yang berlebihan terhadap kelompoknya dan memusuhi kelompok lain secara membabi buta maka hal ini tidak sehat. Apalagi bila fanatisme ini berbaur dengan isu agama (misalnya di Ambon, Maluku dan Poso, Sulawesi Tengah) maka akan dapat menimbulkan gejala ke arah disintegrasi bangsa. Di sini pendidikan multikultural memiliki peran yang penting sebagai wahana peredam fanatisme sempit. Karena di dalam pendidikan multikultural terkandung ajaran untuk menghargai seseorang atau kelompok lain walaupun berbeda suku, agama, rasa atau golongan.

e. Konflik kesatuan nasional dan multikultural

Ada tarik menarik antara kepentingan kesatuan nasional dengan gerakan multikultural. Di satu sisi ingin mempertahankan kesatuan bangsa dengan berorientasi pada stabilitas nasional. Namun dalam penerapannya, bangsa Indonesia pernah mengalami konsep stabilitas nasional ini dimanipulasi untuk mencapai kepentingan-kepentingan politik tertentu. Adanya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dapat menjadi contoh ketika kebijakan penjagaan stabilitas nasional ini berubah menjadi tekanan dan pengerahan kekuatan bersenjata. Hal ini justru menimbulkan perasaan antipasti terhadap kekuasaan pusat yang tentunya hal ini bisa menjadi ancaman bagi integrasi bangsa.

Di sisi multikultural, kita melihat adanya upaya yang ingin memisahkan diri dari kekuasaan pusat dengan dasar pembenaran budaya yang berbeda dengan pemerintah pusat yang ada di Jawa ini. Contohnya adalah gerakan OPM (Organisasi Papua Merdeka) di Papua. Oleh karena itu pendidikan multikultural diharapkan dapat menjembatani berbagai perbedaan ini agar tidak terjadi benturan antara kesatuan nasional dan multikultural.

f. Kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya

Kejadian yang nampak bernuansa SARA seperti Sampit beberapa tahun yang lalu setelah diselidiki ternyata berangkat dari kecemburuan sosial yang melihat warga pendatang memiliki kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik dari warga asli. Jadi beberapa peristiwa di tanah air yang bernuansa konflik budaya ternyata dipicu oleh persoalan kesejahteraan ekonomi.

Orang akan dengan mudah terintimidasi untuk melakukan tindakan yang anarkis ketika himpitan ekonomi mendera mereka. Mereka akan menumpahkan kekesalan mereka pada kelompok-kelompok mapan dan dianggap menikmati kekayaan yang dia tidak mampu meraihnya. Jadi, adanya tekanan ekonomi memaksa orang untuk bertindak destruktif. Berangkat dari hal ini, pendidikan multikultural diharapkan dapat mendidik seseorang untuk berperilaku menurut aturan yang berlaku. Selain itu, pendidikan multikultural diharapkan dapat mengajarkan perbedaan-perbedaan yang dijumpai di masyarakat karena di masyarakat terdiri dari beragam lapisan, seperti si kaya dan si miskin atau golongan borjuis dan proletar. Untuk itu pendidikan multikultural perlu diajarkan untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, tidak peduli dari lapisan mana seseorang itu berasal.

Problem Pembelajaran Pendidikan Multikultural di Indonesia

Pendidikan multikultural yang akhir-akhir ini sedang hangat dibicarakan ternyata tidak terlepas dari berbagai problem yang menghambatnya. Selain problem kemasyarakatan, pendidikan multikultural juga tidak lepas dari problem dalam proses pembelajarannya. Dalam kerangka strategi pembelajaran, pembelajaran berbasis budaya dapat mendorong terjadinya proses imajinatif, metaforik, berpikir kreatif,

dan sadar budaya. Namun demikian, penggunaan budaya lokal (etnis) dalam pembelajaran berbasis budaya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang terdapat dalam setiap komponen pembelajaran, sejak persiapan awal dan implementasinya..

Pada kenyataannya berbagai dimensi dari keberagaman budaya Indonesia dapat menimbulkan masalah dalam proses pembelajaran, terutama dalam kelas yang budaya etnis peserta didiknya sangat beragam, antara lain :

a. Masalah seleksi dan integrasi isi (content selection and integration) mata pelajaran

Implementasi pendidikan multikultural dapat terhambat oleh problem seleksi dan integrasi isi mata pelajaran yang akan diajarkan. Masalah yang muncul dapat berupa ketidakmampuan guru memilih aspek dan unsur budaya yang relevan dengan isi dan topik mata pelajaran. Selain itu masih banyak guru yang belum dapat mengintegrasikan budaya lokal dalam mata pelajaran yang diajarkan, sehingga pembelajaran menjadi kurang bermakna bagi peserta didik.

Untuk mengatasi problem di atas, guru harus memiliki pengetahuan budaya yang memadai. selain itu diperlukan sikap dan keterampilan yang bijaksana dalam memilih metode atau materi pelajaran yang mengandung sensitivitas budaya, misalnya materi tentang perbedaan etnis atau agama. Guru juga dapat memberikan sentuhan warisan budaya sehingga dapat memotivasi peserta didik mendalami akar budayanya sendiri dan akan menghasilkan pembelajaran yang kuat bagi peserta didik. Guru juga dapat menggunakan teknik belajar kooperatif dan kerja kelompok untuk meningkatkan integrasi ras dan etnis di sekolah dan di kelas.

b. Masalah “proses mengkonstruksikan pengetahuan” (the knowledge construction process)

Selain masalah seleksi dan integrasi isi mata pelajaran, masalah proses mengkonstruksi sebuah pengetahuan dapat menjadi problem bagi pendidikan multikultural. Jika peserta didik terdiri dari berbagai budaya, etnis, agama, dan golongan dapat memunculkan kesulitan tersendiri untuk menyusun sebuah bangunan pengetahuan yang berlandaskan atas dasar perbedaan dan keragaman budaya. Seringkali muncul kesulitan dalam menentukan aspek budaya mana yang dapat dipilih untuk membantu peserta didik memahami konsep kunci secara tepat.

Selain itu, guru juga masih banyak yang belum dapat menggunakan frame of reference dari budaya tertentu dan mengembangkannya dari perspektif ilmiah. Hal ini terkait kurangnya pengetahuan dari guru tentang keragaman budaya. Problem lain yang dapat muncul adalah munculnya bias dalam mengembangkan perspektif multikultur untuk mengkonstruksi pengetahuan. Kekhawatiran yang muncul adalah munculnya diskriminasi dalam pemberian materi pelajaran sehingga hanya memunculkan satu kelompok atau golongan tertentu yang menjadi pokok bahasan pembelajaran.

c. Masalah mengurangi prasangka (prejudice reduction)

Prasangka pada mulanya merupakan pernyataan yang hanya didasarkan pada pengalaman dan keputusan yang tidak teruji sebelumnya. Prasangka mengarah pada pandangan yang emosional dan bersifat negatif terhadap orang atau sekelompok orang. Jadi, prasangka merupakan salah satu rintangan atau hambatan dalam berkomunikasi karena orang yang berprasangka sudah bersikap curiga dan menentang pihak lain. Dalam prasangka, emosi memaksa kita untuk menarik kesimpulan atas dasar prasangka buruk tanpa memakai pikiran dan pandangan kita terhadap fakta yang nyata. Karena itu, bila prasangka sudah menghinggapi seseorang, orang tidak dapat berpikir logis dan objektif, dan segala apa yang dilihatnya akan dinilai secara negatif.

Keterbukaan, kedewasaan sikap, pemikiran global yang bersifat inklusif, serta kesadaran kebersamaan dalam mengarungi sejarah, merupakan modal yang sangat menentukan bagi terwujudnya sebuah bangsa Indonesia yang menyatu dalam keberagaman, dan beragam dalam persatuan. Segala bentuk kesenjangan didekatkan, segala keanekaragaman dipandang sebagai kekayaan bangsa, milik bersama. Sikap inilah yang perlu dikembangkan dalam pola pikir masyarakat kita.

d. Masalah kesetaraan paedagogi (equity paedagogy)

Kesetaraan atau kesederajatan bermakna adanya persamaan kedudukan manusia. Kesederajatan adalah suatu sikap untuk mengakui adanya persamaan derajat, hak, dan kewajiban sebagai sesama manusia. Oleh karena itu, prinsip kesetaraan atau kesederajatan mensyaratkan jaminan akan persamaan derajat, hak, dan kewajiban.

Heterogenitas dan Konflik Sosial

Menurut Gregory Tilet dalam bukunya yang merumuskan konflik sebagai segala bentuk interaksi yang bersifat bertentangan atau bersebrangan atau oposisi yang disebabkan oleh berbagai factor dari dalam diri (Nieke, 2011).

Berdasarkan Undang-undang nomer 7 tahun 2012 konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga menunggu stabilitas nasional dan penghambat pembangunan nasional.

Faktor-aktor penyebab konflik sosial menurut Soejono Soekamto dalam (Irwandi & Chotim, 2017) antara lain :

a. Adanya perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan, karena setiap manusia unik, dan mempunyai perbedaan pendirian, persamaan satu sama lain. Perbedaan pendirian dan persamaan ini akan menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial seorang individu tidak selalu sejalan dengan individu atau kelompoknya.

b. Perbedaan latar belakang keduanya sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda-beda, individu sedikit banyak akan terpengaru oleh pola pemikiran dan pendirian kelompoknya, dan itu akan menghasilkan suatu perbedaan individu yang dapat memicu konflik.

c. Perbedaan kepentingan antar individu dan kelompok, individu memiliki latar perasaan, pendirian dan latar belakang budaya yang berbeda. Ketika dalam waktu yang bersamaan masing-masing individu atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda. Kadang, orang dapat melakukan kegiatan yang sama, tetapi tujuannya berbeda. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

d. Faktor terjadinya konflik juga dapat disebabkan karena perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Perubahan adalah sesuatu yang laim dan wajar terjadi, tetapi jikaperubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya pada masyarakat pedesaan yang mengalami industialisas yang mendadak akan memicu konflik sosial, sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri.

Indonesia sebagai negara multikultur, multilas dan multi agama memiliki potensi yang besar untuk mengalami konflik antar kelompok, ras, agama, dan suku bangsa. Indikasi ke arah itu terlihat dari tumbuh suburna organisasi kemasyarakatan , profesi dan organisasi lainnya, serta muncul dari berbagai macam aliran keagamaan. Selain itu, beragam kelompok tersebut dapat memicu terjadinya konflik baru karena kelompok, golongan, agama lain, merasa bahwa kehadiran mereka menjadi ancaman bagi tatanan yang sudah ada dan ajeg serta kepentingan dari kelompok lainnya. Selanjutnya tumbuh sikap etnosentrisme yang menganggap bahwa hanya kelompok golongannya yang paling baik dan sempurna, sedangkan kelompok lain jelek, salah, dan berbagai kekurangan lainnya. Perbedaan kepentingan, pandangan, dan nilai, akan menimbulkan perbedaan persepsi yang kemungkinan besar akan menyebabkan munculnya reaksi berdasarkan persepsi yang kemungkinan besar akan menyebabkan munculnya reaksi berdasarkan persepsi tersebut.

KESIMPULAN

Konflik merupakan interaksi sosial yang berbentuk pertentangan antara individu dengan kelompok dimana salah satu berusaha untuk menyingkirkan pihak lain. Konflik disebabkan oleh berbagai faktor yang memicunnya dan memunculkan dampak negatif bahkan sampai menggoyahkan integrasi bangsa. Konflik sosial memiliki tipologi secara vertical yang merupakan akibat dari proses Polecy pemerintah

yang tidak partisipatif, dalam konteks ini negara memiliki kepentingan terjadinya konflik, sedangkan konflik horizontal diasumsikan konflik sudah terjadi dan menyebar keseluruh aspek sosial, ekonomi, politik, maupun budaya.

Pendidikan multikultural sebagai konsep yang memberikan pemahaman cara hidup untuk saling menghormati dan saling menghargai, toleran terhadap keanekaragaman masyarakat Indonesia dengan tingkat pluralitas yang tinggi, oleh karena itu penguatan pendidikan multikultural sangat urgen untuk dilakukan secara berkesinambungan dan terintegrasi di setiap event,

DAFTAR PUSTAKA

Afif Muhamma. 2013. Agama dan konflik sosial. Bandung ; CV Marja

Ainul Yakin. 2005. Pendidikan multicultural : Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan keadilan. Yogyakarta : Pilar Media.

Asy'arie, Musa. 2004. Pendidikan multicultural dan konflik 1-2. www.kompas.co.id. (Akses 11 Mei 2013).

Banks, James. A. 1993. Multicultural Education: Issues and Perspective. Needham Heights, Massachusetts: Allyn Bacon.

Gorski, Paul. 2001. Six Critical Paradigm Shift or Multicultural Education and The Question We Should Be Asking, <http://www.Edchange.org/multicultural>, diakses tanggal 1 maret 2014.

Najib, Mohammad, M.Ag. 2015. Manajemen Konflik. Bandung : Pustaka Setia.

Tafsir. 2015. Pendidikan Multikultural. Bandung : Pustaka Setia.

Tilaar, H.A.R. 2004. Multikulturalisme : Tantangan global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia